

**“PENGUATAN LITERASI POLITIK GENERASI Z DALAM
MENGHADAPI DINAMIKA DEMOKRASI DIGITAL DI SMKN 6
PALANGKA RAYA”**

**“STRENGTHENING THE POLITICAL LITERACY OF GENERATION Z
IN NAVIGATING THE DYNAMICS OF DIGITAL DEMOCRACY AT
SMKN 6 PALANGKA RAYA”**

Muhlis¹, Aston Pakpakan², Wiwik Suprapti³, Betty Karya⁴, Nur Alfia Tulaili⁵

¹³⁴⁵Program Studi Ilmu Politik, Universitas PGRI Palangka Raya, Indonesia

²Program Studi Manajemen, Universitas Palangka Raya, Indonesia

muhlis24071998@gmail.com¹, astonantonius62@feb.upr.ac.id², wiwiksuprapti61@gmail.com³,
betykarya@gmail.com⁴, nuralfiatulaili@gmail.com⁵,

ABSTRAK

Dinamika demokrasi digital membawa tantangan besar berupa banjir informasi, hoaks, dan polarisasi politik yang menyasar pemilih pemula, khususnya Generasi Z. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menguatkan literasi politik siswa di SMKN 6 Palangka Raya agar mampu menjadi agen demokrasi yang kritis dan bertanggung jawab. Mitra program ini adalah para guru di SMKN 6 Palangka Raya dengan waktu pelaksanaan dari Desember 2025 hingga Mei 2026. Pendekatan yang digunakan adalah kombinasi (mixed-method) yang memadukan pelatihan partisipatif, lokakarya kurikulum terintegrasi, dan evaluasi kuantitatif-kualitatif menggunakan pre-test dan post-test serta focus group discussion (FGD). Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman siswa mengenai hak-hak politik, kemampuan mendeteksi disinformasi, serta etika komunikasi digital sebesar 42%. Selain itu, para guru berhasil menyusun modul pengayaan literasi politik yang terintegrasi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia. Kesimpulannya, kolaborasi akademisi dan sekolah mitra terbukti efektif membentuk ketahanan digital siswa dalam menghadapi dinamika politik elektoral di ruang siber.

Kata Kunci: Demokrasi Digital, Generasi Z, Literasi Politik, Pengabdian Masyarakat, SMK.

ABSTRACT

The dynamics of digital democracy bring significant challenges, including an influx of misinformation, hoaxes, and political polarization targeting first-time voters, particularly Generation Z. This community service project aims to strengthen the political literacy of students at SMKN 6 Palangka Raya, enabling them to become critical and responsible democratic agents. The institutional partners are the teachers of SMKN 6 Palangka Raya, with the implementation period spanning from December 2025 to May 2026. A mixed-method approach was deployed, combining participatory training, integrated curriculum workshops, and quantitative-qualitative evaluations via pre-test, post-test, and focus group discussions (FGD). The results demonstrated a 42% increase in students' comprehension regarding political rights, disinformation detection, and digital communication ethics. Furthermore, the teachers successfully designed supplementary political literacy modules integrated into Pancasila Education and Indonesian Language subjects. In

conclusion, the collaboration between academia and the partner school is proven effective in building students' digital resilience to navigate electoral political dynamics in cyberspace.

Keywords: *Digital Democracy, Generation Z, Political Literacy, Community Service, Vocational High School.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap politik global secara drastis, melahirkan era baru yang dikenal sebagai demokrasi digital. Ruang siber kini bukan lagi sekadar medium komunikasi sekunder, melainkan telah bertransformasi menjadi arena utama kontestasi politik, artikulasi kebijakan, dan mobilisasi massa (Sidiq et al., 2023). Fenomena ini membawa peluang sekaligus tantangan pelik, di mana batas antara informasi faktual dan manipulatif menjadi semakin kabur. Masyarakat tidak hanya bertindak sebagai konsumen informasi, tetapi juga produsen konten yang dapat memengaruhi persepsi publik secara masif dalam hitungan detik. Di tengah derasnya arus digitalisasi ini, kelompok masyarakat yang paling rentan sekaligus paling strategis terdampak adalah Generasi Z yang sedang memasuki usia pemilih pemula.

Generasi Z tumbuh dalam ekosistem digital yang mapan, menjadikan gawai dan media sosial sebagai instrumen utama dalam memahami realitas sosial di sekitar mereka. Karakteristik mereka yang sangat lekat dengan platform visual seperti TikTok, Instagram, dan X membuat mereka menjadi target empuk penetrasi pesan politik (Putri & Wahid, 2024). Namun, kedekatan teknologi ini sering kali tidak diimbangi dengan kedalaman analisis kritis terhadap pesan yang diterima. Akibatnya, mereka rentan terjebak dalam algoritma ruang gema (*echo chamber*) yang menyajikan informasi seragam secara berulang. Ruang gema ini membatasi cakrawala pandang politik mereka dan mempercepat proses radikalisasi opini di ruang digital.

Kondisi tersebut diperparah oleh masifnya persebaran misinformasi, disinformasi, dan ujaran kebencian menjelang pesta demokrasi elektoral di Indonesia. Media sosial sering kali disalahgunakan oleh aktor politik tertentu untuk memproduksi narasi berbasis sentimen identitas demi meraup elektabilitas (Ahmad & Juwito, 2023). Tanpa adanya benteng literasi yang kokoh, pemilih muda cenderung menelan mentah-mentah propaganda digital yang bersifat manipulatif. Fenomena ini berpotensi merusak tatanan demokrasi dasar karena melahirkan keputusan politik yang tidak berbasis data, melainkan emosi sesaat. Oleh karena itu, urgensi membekali pemilih muda dengan kemampuan memilah informasi menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

Sekolah menengah kejuruan (SMK) memiliki posisi taktis dalam struktur pendidikan nasional untuk mencetak warga negara yang tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga matang secara sipil. Siswa di tingkat SMK umumnya berada pada rentang usia 16 hingga 18 tahun, sebuah fase transisi krusial di mana hak pilih pertama mereka akan digunakan (Pratama & Nugroho, 2025). Sayangnya, fokus kurikulum SMK yang condong pada kesiapan kerja praktis terkadang membuat porsi pendidikan politik formal menjadi agak terpinggirkan. Kesenjangan ini menyebabkan siswa SMK sering kali kurang mendapatkan ruang diskusi yang mendalam mengenai etika berdemokrasi di dunia maya.

Padahal, tantangan nyata di media sosial menuntut mereka memiliki kepekaan kritis yang setara dengan kemampuan teknis mereka.

SMKN 6 Palangka Raya, sebagai salah satu institusi pendidikan vokasi di Kalimantan Tengah, menghadapi tantangan geografis dan sosiologis yang spesifik dalam konteks demokrasi digital. Akses internet yang semakin merata di Kota Palangka Raya membuka gerbang informasi seluas-luasnya bagi para siswa di sekolah tersebut. Namun, ketersediaan infrastruktur digital ini belum dibarengi dengan program pendampingan literasi politik sistematis yang menysar dinamika siber (Ramadhan & Utami, 2024). Para siswa kerap terpapar konten politik lokal maupun nasional yang bermuatan hoaks tanpa tahu cara melakukan verifikasi data secara mandiri. Hal ini mendorong perlunya sebuah intervensi edukatif yang mampu menjembatani kebutuhan literasi tersebut di lingkungan sekolah.

Peran pendidik atau guru di SMKN 6 Palangka Raya menjadi instrumen kunci keberhasilan dalam membangun ketahanan politik siswa digital. Guru tidak boleh lagi sekadar menjadi penyampai materi tekstual, melainkan harus bertindak sebagai fasilitator diskusi kritis di ruang kelas (Hidayat & Setiawan, 2023). Tantangannya, tidak semua guru memiliki waktu dan perangkat metodologis yang memadai untuk mengintegrasikan isu-isu demokrasi digital ke dalam mata pelajaran umum. Diperlukan sebuah formula pelatihan yang tidak membebani administratif guru, namun mampu menyuntikkan substansi literasi politik ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Kolaborasi antara akademisi perguruan tinggi dan pihak sekolah menjadi jalan keluar logis untuk mengurai kebuntuan metodologis ini.

Secara konseptual, literasi politik dalam ruang digital tidak hanya berkutat pada pengetahuan tentang lembaga negara dan mekanisme pemilu formal. Literasi politik modern mencakup kemampuan menganalisis bias media, memahami regulasi siber seperti UU ITE, serta mempraktikkan etika berkomunikasi yang santun di kolom komentar (Fadilah & Sukmana, 2024). Ketika Generasi Z memiliki kemampuan ini, mereka tidak akan mudah terprovokasi oleh kampanye hitam (*black campaign*) yang memecah belah bangsa. Mereka justru dapat berbalik menjadi produsen konten positif yang menyebarkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian di jagat maya. Transformasi dari konsumen pasif menjadi pembuat konten kritis inilah yang menjadi capaian ideal dari literasi politik digital.

Menurunnya kualitas diskursus publik di media sosial sering kali berakar dari rendahnya tingkat kesadaran berpolitik masyarakat lapis bawah. Debat yang kusir, saling serang antar-pendukung, dan pembunuhan karakter figur politik menjadi konsumsi sehari-hari remaja di layar gawai mereka (Wibowo & Kusuma, 2025). Jika ekosistem digital yang beracun ini terus dibiarkan tanpa ada intervensi edukasi, esensi demokrasi yang sehat akan perlahan sirna digantikan oleh anarki digital. Generasi muda akan tumbuh menjadi kelompok yang skeptis, apatis, atau sebaliknya, menjadi ekstremis politik yang intoleran. Intervensi literasi politik sejak dini di sekolah adalah investasi jangka panjang demi menyelamatkan masa depan konsensus kebangsaan.

Tantangan lain dalam demokrasi digital adalah fenomena manipulasi psikologis berbasis data atau yang sering disebut dengan mikro-target politik. Algoritma media sosial didesain untuk menyodorkan konten yang sesuai dengan preferensi personal pengguna, sehingga mengunci mereka dalam sudut pandang yang sempit (Nugraha & Lestari, 2023).

Generasi Z yang emosinya masih labil sangat mudah dimanipulasi melalui teknik periklanan politik terarah ini tanpa mereka sadari. Membuka mata para siswa tentang cara kerja algoritma media sosial merupakan salah satu pilar penting dalam kurikulum literasi politik modern. Dengan memahami aspek teknis di balik layar gawai, siswa diharapkan dapat mengambil jarak kritis dari setiap stimuli politik yang muncul.

Berdasarkan analisis situasi di SMKN 6 Palangka Raya, pihak sekolah menyambut baik adanya kemitraan strategis untuk mengurai permasalahan literasi ini. Para guru mengonfirmasi adanya kecenderungan siswa yang mudah ikut-ikutan tren politik viral di media sosial tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya (Saputra & Wardani, 2024). Kendala utama yang dihadapi sekolah adalah minimnya bahan ajar kontekstual yang mengaitkan materi kewarganegaraan dengan realitas digital lokal Kalimantan Tengah. Melalui program pengabdian ini, tim akademisi mencoba menawarkan solusi berupa pendampingan berbasis metode kombinasi untuk memperkuat kapasitas guru dan siswa secara simultan.

Pendekatan kombinasi dalam pengabdian ini dipilih agar hasil intervensi dapat diukur secara presisi sekaligus memiliki kedalaman narasi kualitatif. Data kuantitatif diperlukan untuk melihat persentase lonjakan pemahaman konsep politik siswa sebelum dan sesudah intervensi (Suryani & Wijaya, 2023). Sementara itu, data kualitatif digunakan untuk menggali perubahan perilaku, sikap, dan tingkat kesadaran kritis siswa serta guru selama proses pendampingan berjalan. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa output pengabdian tidak hanya berhenti sebagai laporan seremonial, tetapi menghasilkan dampak perilaku yang nyata.

Pelaksanaan kegiatan yang dirancang dari Desember 2025 hingga Mei 2026 ini mengambil momentum yang sangat pas di tengah transisi politik nasional. Dinamika pasca-pemilu biasanya menyisakan polarisasi sosial yang cukup tajam di kalangan akar rumput, termasuk remaja sekolah (Purnomo & Handayani, 2024). Periode enam bulan ini dimanfaatkan untuk melakukan penyadaran bertahap, mulai dari perencanaan, eksekusi pelatihan, hingga evaluasi dampak program. Fokus penguatan diarahkan pada integrasi materi literasi ke dalam struktur kurikulum yang sudah ada di sekolah mitra sehingga keberlanjutan program tetap terjamin.

Melalui sinergi yang intensif, pengabdian ini diproyeksikan mampu melahirkan model pembelajaran literasi politik yang adaptif bagi SMK lain di wilayah Kalimantan Tengah. Palangka Raya sebagai pusat pemerintahan provinsi membutuhkan percontohan institusi pendidikan yang melek digital dan matang secara politik (Prasetiadi & Utama, 2025). Keberhasilan SMKN 6 Palangka Raya dalam mengadopsi program ini akan menjadi magnet bagi penguatan literasi sipil di wilayah sekitarnya. Hal ini sejalan dengan visi pendidikan nasional untuk melahirkan Profil Pelajar Pancasila yang bernalar kritis dan berkebinekaan global.

Secara teoretis, artikel pengabdian ini memberikan kontribusi pada khazanah literasi politik elektoral dengan memfokuskan kajian pada karakteristik spesifik Generasi Z di sekolah vokasi. Banyak penelitian sebelumnya yang hanya menyasar mahasiswa atau masyarakat umum, sementara pelajar SMK sering kali terabaikan dalam diskursus demokrasi digital (Rizki & Gunawan, 2024). Karakteristik vokasional yang praktis menuntut

penyampaian materi politik yang aplikatif, visual, dan dekat dengan kehidupan keseharian mereka. Artikel ini mencoba mengisi ruang kosong tersebut dengan menyajikan draf konseptual dan praktis yang telah diuji di lapangan.

Dengan latar belakang tersebut, pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Penguatan Literasi Politik Generasi Z dalam Menghadapi Dinamika Demokrasi Digital" ini penting untuk didokumentasikan secara ilmiah. Melalui pemaparan yang komprehensif, diharapkan para pembaca, akademisi, dan praktisi pendidikan dapat mereplikasi esensi program ini di daerah masing-masing. Langkah kecil di ruang kelas SMKN 6 Palangka Raya ini diharapkan mampu menjadi sumbangsih nyata bagi kokohnya fondasi demokrasi digital Indonesia di masa depan.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan pendekatan kombinasi (*mixed-method*) yang mengintegrasikan pelatihan partisipatif, lokakarya (*workshop*), dan pendampingan intensif. Mitra sasaran utama adalah para guru di SMKN 6 Palangka Raya, yang kemudian bertindak sebagai mentor bagi siswa Generasi Z di sekolah tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan selama enam bulan, terhitung mulai dari Desember 2025 hingga Mei 2026.

Tahapan pelaksanaan dibagi menjadi tiga fase utama:

1. Fase Persiapan (Desember 2025): Meliputi koordinasi dengan pihak manajemen sekolah, analisis kebutuhan (*need assessment*) literasi politik, dan penyusunan instrumen evaluasi berupa draf pre-test.
2. Fase Pelaksanaan (Januari–April 2026): Pelaksanaan inti program yang menjabarkan rangkaian intervensi secara kronologis. Rincian lini masa aktivitas pada fase ini disajikan secara scannable pada tabel di bawah ini.
3. Fase Evaluasi & Pelaporan (Mei 2026): Pengukuran dampak program menggunakan pos-test, analisis data kombinasi, pelaksanaan FGD refleksi bersama guru mitra, serta penyusunan laporan akhir dan artikel ilmiah.

Bulan (2026)	Fokus Kegiatan	Target & Output
Januari	Sosialisasi program dan pelaksanaan <i>pre-test</i> awal bagi guru dan perwakilan siswa.	Terpetakannya peta jalan literasi awal; basis data pemahaman dasar peserta terkumpul.
Februari	Lokakarya (<i>Workshop</i>) Penyusunan Modul Pengayaan Literasi Politik Digital bagi Guru.	Tersusunnya draf modul pengayaan yang terintegrasi kurikulum Pendidikan Pancasila.

Bulan (2026)	Fokus Kegiatan	Target & Output
Maret	Pelatihan Partisipatif "Gen-Z Cakap Politik" bagi siswa kelas X dan XI.	Meningkatnya kemampuan siswa dalam verifikasi hoaks dan etika komunikasi siber.
April	Pendampingan praktik pembuatan konten kampanye positif dan simulasi forum debat digital.	Produksi 15 konten video kreatif edukasi politik oleh siswa di platform TikTok/Instagram.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di SMKN 6 Palangka Raya berjalan dengan lancar dan mendapatkan antusiasme yang tinggi dari seluruh warga sekolah. Pada tahap awal yang dilaksanakan melalui *pre-test*, ditemukan bahwa pemahaman dasar siswa mengenai esensi demokrasi digital, mekanisme penyaringan hoaks politik, dan regulasi hukum siber masih berada pada kategori rendah dengan nilai rata-rata 52 dari 100. Intervensi yang terstruktur melalui lokakarya bagi guru dan pelatihan interaktif bagi siswa berhasil mengubah lanskap pengetahuan tersebut secara signifikan. Berdasarkan data *post-test* yang diambil pada akhir kegiatan, nilai rata-rata peserta melonjak tajam menjadi 74, yang menandakan adanya peningkatan pemahaman bersih sebesar 42%.

Hasil nyata lain dari pengabdian ini adalah lahirnya produk kurikulum berupa modul pengayaan literasi politik digital yang berhasil disusun oleh para guru mitra. Modul ini memuat panduan praktis bagi pendidik untuk menyisipkan nilai-nilai demokrasi, cara mendeteksi bias informasi, dan etika bermedia sosial ke dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila serta Bahasa Indonesia. Keberadaan modul ini memastikan bahwa substansi pengabdian tidak hilang setelah tim pengabdian selesai melaksanakan program, melainkan melembaga dalam sistem pembelajaran sekolah. Guru-guru kini memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi dalam mengelola dinamika diskusi politik yang terjadi di kalangan siswa di dalam ruang kelas.

Dari sisi siswa, pengabdian ini berhasil menstimulasi kreativitas digital yang sehat dan produktif melalui penugasan berbasis proyek. Siswa tidak hanya diajarkan teori, tetapi juga ditantang untuk memproduksi konten edukasi politik yang kreatif di akun media sosial masing-masing. Hasilnya, terkumpul 15 video edukasi berdurasi pendek di platform TikTok dan Instagram yang membahas pentingnya hak pilih pemula, cara mengecek keaslian berita, dan larangan menyebarkan ujaran kebencian. Konten-konten ini menggunakan bahasa khas anak muda yang santun namun menarik, sehingga mampu menjangkau audiens sebaya dalam ekosistem digital mereka secara lebih natural.

Pelaksanaan simulasi forum debat digital juga memberikan gambaran nyata mengenai perubahan sikap siswa dalam merespons perbedaan pendapat. Sebelum program

dimulai, siswa cenderung reaktif dan emosional ketika dihadapkan pada opini politik yang bertentangan di kolom komentar tiruan yang disediakan tim pengabdian. Setelah mendapatkan materi tentang resolusi konflik siber dan logika formal, siswa menunjukkan kedewasaan berpendapat yang jauh lebih matang. Mereka mampu menyusun argumentasi berbasis data literatur, menghindari serangan personal (*ad hominem*), dan menghargai keberagaman perspektif sebagai keniscayaan demokrasi.

Terakhir, pengabdian ini berhasil membangun komitmen bersama antara pihak manajemen SMKN 6 Palangka Raya dengan tim pengabdian untuk menjaga keberlanjutan program melalui pembentukan Komunitas Remaja Melek Politik (Kompak). Komunitas internal siswa ini diproyeksikan menjadi wadah diskusi berkala dan menjadi agen penangkal hoaks di lingkungan internal sekolah. Kepala sekolah memberikan apresiasi tinggi dan berencana mengalokasikan jam kegiatan khusus dalam kalender akademik tahun depan untuk kegiatan berbasis literasi kewarganegaraan digital ini. Hal ini membuktikan bahwa luaran pengabdian berhasil menyentuh aspek struktural dan kultural sekolah mitra.

Pembahasan

Keberhasilan peningkatan pemahaman politik siswa SMKN 6 Palangka Raya sebesar 42% mengonfirmasi bahwa Generasi Z bukanlah kelompok yang sepenuhnya apatis, melainkan kekurangan akses terhadap edukasi politik yang ramah digital. Konsep pelatihan partisipatif yang diterapkan dalam program ini sejalan dengan teori pedagogi kritis yang menekankan pentingnya dialog setara untuk membongkar hegemoni informasi (Sidiq et al., 2023). Ketika siswa diberikan ruang untuk menganalisis studi kasus riil mengenai manipulasi hoaks, nalar kritis mereka bekerja lebih optimal dibandingkan sekadar menghafal teks hukum tata negara. Hal ini membuktikan bahwa metode pembelajaran politik bagi pemilih pemula harus diubah dari pola indoktrinasi satu arah menjadi eksplorasi interaktif yang menyenangkan.

Integrasi nilai literasi ke dalam modul ajar oleh guru mitra merupakan langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan dampak program secara institusional. Menurut Putri dan Wahid (2024), kelemahan mendasar dari banyak program pengabdian masyarakat adalah sifatnya yang temporal dan lekas hilang pasca-proyek selesai. Dengan menitikpkan substansi literasi politik dalam rencana pembelajaran formal, SMKN 6 Palangka Raya telah menciptakan sistem pertahanan mandiri terhadap paparan radikalisme digital. Guru kini berfungsi sebagai kurator informasi di sekolah, yang secara konstan melatih siswa untuk selalu melakukan *cross-check* terhadap setiap informasi politik yang viral.

Produksi konten video kreatif oleh siswa di platform TikTok dan Instagram menunjukkan pergeseran peran yang signifikan dari konsumen informasi menjadi produsen pesan yang bertanggung jawab. Di era demokrasi digital, perang narasi tidak lagi dimenangkan oleh pemilik modal besar, melainkan oleh kreativitas konten yang mampu menyentuh emosi publik secara positif (Ahmad & Juwito, 2023). Generasi Z memiliki modal kultural berupa penguasaan teknologi visual yang tinggi, yang jika diarahkan secara tepat, dapat menjadi pilar kokoh penyebaran nilai kebangsaan. Konten buatan siswa ini terbukti efektif menjadi penyeimbang di tengah keruhnya arus hoaks politik lokal yang sering kali beredar di wilayah Kalimantan Tengah.

Kedewasaan berpendapat yang ditunjukkan siswa selama simulasi debat digital membuktikan bahwa etika siber dapat dibentuk melalui pembiasaan yang terstruktur. Kebiasaan netizen Indonesia yang sering kali bertindak tidak sopan di media sosial sebagian besar disebabkan oleh absennya keteladanan dan edukasi tata krama digital di sekolah (Fadilah & Sukmana, 2024). Melalui intervensi ini, siswa memahami bahwa kebebasan berpendapat di ruang digital tetap dibatasi oleh hak-hak orang lain dan tanggung jawab moral sebagai warga negara. Kesadaran ini sangat krusial guna mencegah keterlibatan remaja dalam kasus hukum pelanggaran UU ITE yang kerap terjadi akibat ketidaktahuan regulasi. Secara teoretis, hasil pengabdian ini memperkuat argumen bahwa literasi politik digital bagi pemilih pemula harus mencakup pemahaman tentang ekonomi politik media dan algoritma platform. Siswa tidak cukup hanya diajarkan moralitas, tetapi harus dibongkar pemahamannya mengenai bagaimana algoritma bekerja menciptakan polarisasi demi keuntungan trafik (Nugraha & Lestari, 2023). Dengan memahami bahwa ada kepentingan bisnis di balik viralnya suatu isu, siswa menjadi lebih waspada dan tidak mudah tergerak menjadi pion politik gratisan di dunia maya. Model penguatan holistik ini diharapkan dapat diadopsi oleh dinas pendidikan terkait untuk direplikasi pada skala kebijakan yang lebih luas.

KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dari Desember 2025 hingga Mei 2026 di SMKN 6 Palangka Raya berhasil membuktikan bahwa pendekatan kombinasi terstruktur efektif dalam mendongkrak literasi politik Generasi Z. Melalui sinergi pelatihan interaktif dan lokakarya kurikulum, pemahaman siswa mengenai dinamika demokrasi digital mengalami lonjakan yang signifikan dan terukur. Kolaborasi ini tidak hanya mencerdaskan siswa secara kognitif, tetapi juga membekali para guru dengan perangkat metodologi pengajaran politik yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Transformasi perilaku siswa dari sekadar konsumen pasif menjadi kreator konten edukasi politik yang kritis merupakan capaian fundamental dari program ini. Adanya 15 konten video kreatif penangkal hoaks yang tersebar di media sosial membuktikan bahwa pemilih pemula memiliki potensi besar untuk menjadi agen perdamaian digital di akar rumput. Di sisi lain, pelebagaan materi literasi ke dalam dokumen kurikulum sekolah menjamin bahwa napas dari program pengabdian ini akan terus berlanjut dan dirasakan oleh generasi siswa pada tahun-tahun ajaran berikutnya.

Sebagai rekomendasi, pihak SMKN 6 Palangka Raya disarankan untuk terus mengawal eksistensi Komunitas Remaja Melek Politik (Kompak) yang telah dibentuk agar tidak kehilangan momentum pergerakannya. Selain itu, diperlukan perluasan jaringan kemitraan dengan lembaga eksternal seperti KPU lokal dan Bawaslu untuk memberikan pembaruan informasi regulasi pemilu secara berkala. Model pengabdian berbasis kemitraan sekolah-perguruan tinggi ini layak dijadikan cetak biru bagi upaya penguatan ketahanan siber sipil di wilayah Kalimantan Tengah lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah memberikan dukungan pendanaan bagi terlaksananya program ini. Apresiasi setinggi-tingginya juga kami haturkan kepada Kepala Sekolah, segenap jajaran guru, dan staf administrasi SMKN 6 Palangka Raya atas keterbukaan, fasilitas ruang diskusi, dan kerja sama yang sangat luar biasa sepanjang periode pelaksanaan program dari Desember 2025 hingga Mei 2026. Tidak lupa, terima kasih kepada seluruh siswa kelas X dan XI SMKN 6 Palangka Raya yang telah berpartisipasi aktif dengan penuh semangat dan kreativitas sebagai representasi masa depan demokrasi digital Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J., & Juwito, J. (2023). Kontestasi politik di era digital: Strategi komunikasi politik pemilih pemula Generasi Z. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 27(1), 45–58.
- Fadilah, N., & Sukmana, H. (2024). Etika komunikasi siber dan literasi hukum pemilih muda menghadapi polarisasi digital. *Jurnal Tata Kelola Komunikasi*, 6(2), 112–126.
- Hidayat, R., & Setiawan, A. (2023). Peran guru Pendidikan Pancasila dalam membangun resiliensi politik siswa di era disinformasi. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 201–213.
- Nugraha, A. R., & Lestari, P. (2023). Membongkar ruang gema (*echo chamber*): Tantangan literasi politik remaja dalam algoritma media sosial. *Jurnal Komunikasi Massa*, 16(1), 89–102.
- Pratama, F. A., & Nugroho, S. (2025). Pendidikan vokasi dan kesadaran sipil: Urgensi literasi politik bagi siswa SMK pemilih pemula. *Jurnal Pendidikan Vokasi Indonesia*, 13(1), 34–46.
- Prasetiadi, T., & Utama, M. (2025). Peta digitalisasi dan perilaku politik masyarakat urban Kota Palangka Raya. *Jurnal Penelitian Politik Kalimantan*, 7(2), 150–164.
- Purnomo, H., & Handayani, S. (2024). Dinamika pasca-pemilu: Polarisasi sosial dan mitigasi konflik siber di kalangan pelajar. *Jurnal Konflik dan Perdamaian*, 8(1), 77–91.
- Putri, D. A., & Wahid, U. (2024). Karakteristik konsumsi media sosial TikTok oleh Generasi Z sebagai instrumen pendidikan politik. *Jurnal Komunikasi Digital*, 15(3), 210–225.
- Ramadhan, M. F., & Utami, T. (2024). Tantangan literasi digital dan penyebaran hoaks politik lokal di Kalimantan Tengah. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 10(2), 133–145.
- Rizki, C., & Gunawan, I. (2024). Menjembatani kesenjangan literasi politik antara siswa sekolah umum dan sekolah kejuruan. *Jurnal Edukasi Kewarganegaraan*, 11(2), 95–108.
- Saputra, A., & Wardani, K. (2024). Fenomena ikut-ikutan tren politik viral: Studi kasus perilaku digital siswa menengah di Palangka Raya. *Jurnal Psikologi Sosial Remaja*, 5(4), 312–326.

Sidiq, R., Muhtar, T., & Lukman, L. (2023). Demokrasi digital dan partisipasi politik Generasi Z: Peluang dan tantangan masa depan bangsa. *Jurnal Pemikiran Politik Indonesia*, 19(2), 120–135.

Suryani, E., & Wijaya, H. (2023). Penerapan metode penelitian kombinasi (*mixed-methods*) dalam evaluasi program pengabdian masyarakat. *Jurnal Metodologi Terapan*, 4(3), 180–195.

Wibowo, T., & Kusuma, R. (2025). Toksisitas kolom komentar media sosial dan pengaruhnya terhadap skeptisisme politik remaja. *Jurnal Media dan Kebudayaan*, 12(1), 60–74.